PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP EFEKTIVITAS BELANJA MODAL PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Intan Dyah Pranalingga
pranalingga@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Efektivitas Belanja Modal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Susi Susanti dan Heru Fahlevi, bahwa terdapat pengaruh antara Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Efektivitas Belanja Modal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Poupulasi yang digunakan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Provinsi Banten sejumlah 43 OPD.

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 23 menunjukkan bahwa DAU dan DAK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas belanja modal di pemerintahan provinsi Banten.

Kata kunci : DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), Belanja Modal, Efektivitas, Pemerintah Provinsi Banten.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF GENERAL ALLOCATION FUNDS (GAF) AND DISTINCTIVE ALLOCATION FUNDS (DAF) ON THE EFFECTIVENESS CAPITAL EXPENDITURE IN BANTEN PROVINCE GOVERNMENT

Intan Dyah Pranalingga
pranalingga@gmail.com

The objective of the research is to analyze the influence of the General Allocation Fund and Distinctive Allocation Fund on the Effectiveness of Capital Expenditures. The theory used in this study refers to the opinion of Susi Susanti and Heru Fahlevi; that there is an influence between the General Allocation Fund and Distinctive Allocation Fund on the Effectiveness of Capital Expenditures.

The research method used was a quantitative method through questionnaires. The Population used was the Regional Device Organization (RDO) in Banten Province Government of 43 RDO.

Based on the results of the study by using multiple linear regression analysis with the help of SPSS 23 version, showed that GAF and DAF have a significant influence on the effectiveness of capital expenditure in Banten province government.

Keywords: General Allocation Funds (GAF), Distinctive Allocation Funds (DAF), Effectiveness Capital Expenditure, Banten Province Government

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang sedang bergulir saat ini merupakan sebagian dari adanya reformasi atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Otonomi daerah diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan peraturan pembaharuan dari peraturan sebelumnya yaitu UU No. 22/1999 yang mengatur berbagai kewenangan daerah. Kewenangan yang dimaksud salah satunya adalah kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sebagai bentuk perwujudan adanya reformasi dalam bidang keuangan negara terkait hubungan pemerintah pusat dan

daerah, diterbitkan pula UU No. 33/2004 tentang perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan pembaharuan dari UU No. 25/1999. Kedua peraturan tersebut merupakan bagian utama dalam reformasi di bidang keuangan daerah. Penerbitan kedua undang-undang tersebut menjadi momentum penting dalam reformasi keuangan daerah (Halim dan Damayanti, 2008: 3-5).

Diberlakukannya UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004 memberikan kewenangan dan keleluasaan yang lebih luas bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagai pelaksana dan promotor pembangunan di daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan pembangunan wilayah yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Otonomi daerah merupakan bentuk dari desentralisasi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan tahun 2001 menentukan bahwa konsentrasi daerah otonom berada di kota atau kabupaten dan bukan di provinsi. Hal ini terlihat dari proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) 10% dan 90 % dari DAU yang ditetapkan, yaitu 25% dari pendapatan dalam negeri APBN. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran kota atau kabupaten dalam otonomi daerah, sebagai titik pertumbuhan ekonomi. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Banyak hal yang ingin dicapai melalui otonomi daerah. Dalam bidang

ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan layanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal.

Pemerintah daerah mempunyai peran yang strategis dalam menyediakan infrastruktur. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Selain belanja modal yang merupakan pengeluaran daerah yang cukup berpengaruh terhadap peningkatan roda ekonomi daerah adalah belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan belanja

hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan dan juga untuk program-program pelayanan publik (Saragih, 2003; Stine, 1994).

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing – masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing – masing daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. Menurut Adrian (1999) terdapat tujuh prinsip dasar pengalokasian DAU yang harus dipertimbangkan pemerintah, yaitu (1) Kecukupan (adequacy); (2) Netralitas dan efisiensi (neutrality and efficiency); (3) Akuntabilitas (accountability); (4) Relevansi dengan tujuan (relevance); (5) Keadilan (equity); (6)

Objektivitas dan transparansi (objectivity dan transparency); (7) Kesederhanaan (simplicity). Studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2004) menemukan bukti empiris bahwa dana transfer dalam jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

B. METODE PENELITIAN

Setiap penelitian lazimnya menggunakan pendekatan dan metode. Pendekatan dan metode yang dipakai biasanya merujuk pada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih mengandalkan angka-angka berupa skor sebagai kerangka dasar analisis. Skor tersebut diperoleh dengan metode survey. Metode ini, menurut Kerlinger & Lee (2000:599), lazimnya digunakan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi dan hubungan-hubungan antar variable.

Dalam hal ini, survei yang dimaksudkan untuk mempelajari sikap, keyakinan nilai-nilai, demografi, tingkah laku, opini,

kebiasaan, keinginan, ide-ide dan tipe informasi lain (McMillan & Schumacher, 2006 :233). Dari data, fakta dan informasi yang diperoleh melalui survei tersebut dapat digambarkan kondisi masing-masing variable yang diteliti sehingga memungkinkan untuk diketahui Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Efektivitas Belanja Modal Pemerintah Provinsi Banten.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh DAU dan DAK secara simultan terhadap efektivitas Belanja Modal adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $50,13 > F$ table 3,23 sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh DAU dan DAK secara simultan terhadap Efektivitas Belanja Modal. Dengan presentase 71,5 %

D. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh DAU (x_1) terhadap Y adalah sebesar $0,034 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,192 > 2,021 t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis diterima yang berarti terdapat

pengaruh yang signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Efektivitas Belanja Modal dengan presentase 19,5 %

2. diketahui nilai Sig. untuk pengaruh DAK (x2) terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 8,560 > 2,021 t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap Efektivitas Belanja Modal dengan presentase 76,3 %
3. diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh DAU dan DAK secara simultan terhadap efektivitas Belanja Modal adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $50,13 > F \text{ table } 3,23$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis diterima yang berarti terdapat pengaruh DAU dan DAK secara simultan terhadap Efektivitas Belanja Modal. Dengan presentase 71,5 %

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain :

- (1) Untuk dapat meningkatkan alokasi belanja daerah, pemerintah daerah harus dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(2) Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambahkan variabel independen yang lainnya baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah atau kondisi makro ekonomi.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budi Winarno, Ph.D, Teori Kebijaksanaan Publik, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.

Arikunto, S. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998.

Atmosudirdjo, Prajudi. Dasar-dasar Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Barata, Atep Adya. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media Kompetindo, 2003.

Blau, Peter M. & Meyer. Birokrasi Dalam Masyarakat Modern. Jakarta : Rineka Cipta, 2000.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Kuncoro, Mudrajad. 2007. Otonomi Daerah & Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi dan peluang). Jakarta : Penerbit Erlangga

Halim, Abdul 2007, Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Salemba

Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Untuk Eksekutif dan legislatif Rangkuman 7 Undang-undang, 30 Peraturan

Pemerintah dan 15 Permendagri. Jakarta Barat: Indeks.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik- Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Priyatno, Duwi. 2011. Buku Saku SPSS (Analisis Statistik Data Lebih Cepat, Efisien, dan Akurat). Yogyakarta : Mediakom

Karya Tulis :

Aprizay, Yudi Satrya, Darwanis & Muhammad Arfan. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi. Universitas Syiah Kuala. Vol: 3 No. 1 Februari 2014 pp.140-149.

Ardhani, Pungky. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Journal. Semarang: Universitas Diponegoro.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Skripsi Tidak Dipublikasikan.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang no 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK 02/ 2011 Tentang Klasifikasi Anggaran Belanja Modal.